LAPORAN KEGIATAN PEJABAT/STAF DALAM MENGHADIRI

RAPAT/SEMINAR/PERTEMUAN

Hal : Laporan Kegiatan

Lampiran : -

Klaten, 4 Juli 2022

Yth. Direktur Utama

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Bersama ini kami laporkan hasil menghadiri kegiatan sebagai berikut:

NO.	JENIS KEGIATAN	PENYELENGGARA	STATUS	WAKTU & TEMPAT	KESIMPULAN	SARAN	RTL
1	Appraisal Meeting IsDB "Strengthening of National Referral Hospital on Oncology Center Project (IDN 1054)"	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan Islamic Development Bank (IsDB)	Peserta	- WAKTU: Hari/Tanggal: Senin – Rabu , 27 – 29 Juni 2022 - TEMPAT: Hotel Swiss-Belinn Bogor	**A. Islamic Develompent Bank (IsDB):** 1. Rangkaian persiapan usulan sudah pada tahapan appraisal untuk usulan kegiatan oncology center. Rencana September Project Approve, setelah itu project signing, project effectiveness, dll 2. Nasional cancer registry di dalam project ini fokus pada 6 RS namun dalam pengembangannya 6 RS akan menjadi pilot project dan akan di line kan dengan RS Dharmais selaku pengampu RS Kanker Rujukan Nasional, sehingga akan berkontribusi ke dalam skala nasional. 3. Apresiasi PIU sudah memahami climate change. Demolish diperhatikan agar dapat diselesaikan on time. Design and considering topic terkait lighting, AC, posisi building terhadap equator dsb serta integrated equipment, building and training 4. Medical tourism mohon untuk dijadikan target karena merupakan bagian dari isu besar proyek ini 5. Jejaring akan menjadi concern penting dalam proyek ini, 6 RS dengan RS Dharmais maupun 6 RS dengan RS Jejaring yang diampu 6. Pendanaan yang bersumber dari IsDB menggunakan 2 sistem yaitu Direct Payment dan Reksus. Project financing hampir semuanya direct payment kecuali startup workshop dan PMU Cost. 7. Direct payment pembayaran langsung kepada pihak ketiga, dokumen dikirim ke PIU nanti PIU submit melalui KPPN ke IsDB dan jika KPPN sudah clear IsDB langsung membayar ke pihak ketiga	-	1. Memperbaiki dokumen dan data dukung sesuai dengan koreksi, masukan dan arahan pada appraisal meeting. 2. Berkoordinasi lebih intens dengan tim PMU Yankes dan IsDB serta PIU RS lain dan juga RS Kanker Dharmais selaku RS Pengampu. 3. Menyiapkan segala proses persiapan seperti proses demolish, proses perizinan (AMDAL, BAPETEN, IMB dll), persiapan procurement, persiapan startup workshop dsb.

					8. Reksus atau rekening khusus (special account) seperti petty cash, pengisian uang ketika 50% telah digunakan atau sudah 6 bulan. Proses pengajuan Reksus harus ada Audit Clearance dari BPKP lalu disubmit ke IsDB setelah itu uang dititipkan ke BI dan pencairan melalui KPPN ke dalam rekening tampungan 9. IsDB memonitor penggunaan Reksus dengan contact langsung ke KPPN apakah Reksus tersebut aktif penggunaannya jika tidak aktif akan dimintai keterangan kenapa uang belum digunakan 10. Audit BPKP untuk proyek IsDB yaitu Annual Auditing dan Audit Interim (Audit Clearance untuk pengisian Reksus). Annual auditing disubmit ke IsDB paling lambat 6 bulan oleh BPKP 11. Start up workshop merupakan workshop secara detail tentang teknis proyek. Startup workshop dilakukan setelah project di approve sehingga tim PIU tidak boleh berubah karena sudah harus mengikuti dari awal agar tidak ada pembelajaran ulang 12. Analisis proyek dan risiko proyek berdasarkan titik lokasi proyek tersebut dan menggunakan data historis dan geologis. Ada potensi vulkanik yang perlu diwaspadi, risiko gempa bumi juga perlu diperhitungkan dalam DED. Integrasikan bagaimana risiko geografis atau geologi ini dapat dihindari dengan memanfaatkan mitigasi risiko. Ada system supply chain yang baik jadi ketika ada bencana alam maka RS dan fasilitas tetap dapat dilaksanakan dengan baik 13. Pelaksanaan project 5 tahun, 1 minggu setelah project approval selesai, maksimal 6 bulan proses selanjutnya (666 regulatory) dan setelah 6 bulan proses terakhir diharapkan sudah mulai disbursement. Di quarter 4 tahun 2022 atau quarter 1 tahun 2023 proses rekrut DEDC. Kontrak DEDC ditandatangani setelah tandatangan financial agreement. Berdasarkan Procurement IsDB Guidleine, kontrak akan ditandatangani setelah project efektif. Strategi Procurement untuk menjawab isu TKDN dengan Internasional Competitive Bidding (ICB) dan Nasional Competitive Bidding (NCB) dengan kriteria 56% menggunakan prinsip TKDN		

					B. Kementerian Kesehatan 1. Kanker dipilih dalam proyek ini karena merupakan 3 besar penyakit dan merupakan penyakit masa depan sehingga Kementerian Kesehatan harus memperkuat pelayanan kanker. 2. Kemenkes disetujui Bappenas dan Kemenkeu mengadakan kerjasama dengan IsDB dan sepakat proyek ini untuk mendukung pelayanan kanker di seluruh Indonesia, sehigga lokasi proyek sebagian besar di luar pulau jawa agar terjadi pemerataan pelayanan. 3. Penandatanganan Minute of Meeting yang terdiri dari Justifikasi, Scope, Cost, Implementasi time schedule / millestone, Pembentukan PMU dan PIU dan Procurement prosedur 4. Masing-masing PIU melengkapi data target pasien kanker baik Rawat Jalan dan Rawat Inap (angka baseline dan target yang akan dicapai per tahun) 5. Untuk cancer registry dalam proyek ini minimal RS terhubung di RS Pengampu yang tergabung di cancer registry 6. Sekilas gambar Pre DED sudah sesuai dengan konsep Menteri Kesehatan dimana ruang terbuka hijaunya banyak, keseragaman warna (soft), dan detail per ruangan (desain interior dan alur) **C. Kementerian Keuangan** 1. Kemenkes untuk mereviu kembali sesuai kesepakatan dalam appraisal, ada beberapa item tambahan untuk dipenuhi 2. Analisa AMDAL harus diperhatikan 3. Proyek ini tidak hanya menambah gedung tetapi nilai tambah apa yang didapatkan dalam usulan kegiatan ini, berharap tidak banyak perubahan sesuai dengan usulan yang disampaikan. 4. Time line dan target negosiasi, ada persyaratan penyampaian draft agreement dan pengajuan daftar kegiatan. Perhatikan closing date ada titik kritis yang perlu dilakukan mitigasi risiko		

					5. Strategi pengadaan fokus kebijakan TKDN yang dimasukkan dalam procurement dan konsultasi dengan LKPP karena akan menjadi perhatian penting Auditor BPKP 6. Mekanisme pencairan dari IsDB dengan direct payment dan reksus sehingga untuk memastikan proyek berjalan maka perlu koordinasi se awal mungkin dengan KPPN untuk proses pencairan nanti **D. BAPPENAS** 1. Ekspektasi proyek ini besar tidak hanya sekedar membangun gedung dan membeli alat kesehatan namun memastikan sesuai dengan outcome yang tercantum dalam RC (greenbook dan blue book) yaitu meningkatkan kapasitas layanan kanker dalam konteks indikator waktu tunggu pelayanan kanker. Nilai tambah adalah nilai tambah secara nasional, tim IsDB untuk memformulasikannya sehingga kelihatan di dalam appraisal dengan mainstreaming value change analysys. 2. Penentuan scope dan konsep serta hal lain perlu didiskusikan secara spesifik 3. Jejaring layanan onkologi tdk hanya pada 6 RS melainkan ratusan RS lainnya, harapan Bappenas setiap PIU memaparkan proyeksi pasien yang akan dicover dari wilayah / RS mana saja sehingga tujuan mengembangkan jejaring ada sharing beban kasus dan harus clear di awal, RS akan mengampu wilayah yang mana saja. 4. National cancer registry hanya memunculkan 6 RS, Bappenas ingin memastikan goal besar dapat diterjemahkan dalam presentasi ini serta mengingatkan kembali pada outcome besarnya 5. Rencana jadwal, disbursement dan penganggaran sepakat harus lebih realistis, untuk dilihat kembali yang akan dialokasikan dalam DIPA 2023 karena Rencana penarikan harus difinalkan dalam DIPA. Jika februari atau maret 2023 proyek sudah efektif maka perlu dikaji kembali berapa lama waktu yang dapat dipercepat sehingga mendapatkan schedule yang realistis agar objektif.		

					E. BPKP 1. BPKP melakukan audit atas project yang didanai oleh pinjaman luar negeri 2. Audit yang dilakukan oleh BPKP adalah audit keuangan yaitu memberikan penilaian terhadap tujuan program, indicator keberhasilan, menilai kewajaran Laporan Keuangan, menilai pengendalian intern, menilai kesesuaian aturan-aturan terkait pendanaan, pengadaan dan yang paling penting penilaian terhadap keberhasilan program 3. RS penerima project wajib menyusun laporan keuangan dan kewajaran laporan keuangan serta memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik karena kesalahan maupun kesengajaan. 4. Pengadaan mengacu Procurement guidline dari lender dalam hal ini IsDB jadi jangan sampai tercampur dengan pengadaan lainnya. 5. Dalam hal produksi dalam negeri belum tersedia maka boleh menggunakan produk luar negeri 6. Perpres 12/2021 pasal 67 memberikan preferensi harga paling tinggi 25% untuk barang dan jasa, sedangkan untuk konstruksi 7,5%. 7. Menyusun rencana strategis pengadaan, jika sudah ada loan agreement		

Pejabat / Staf yang hadir:

1. Direktur Utama ..... dr. Endang Widyaswati, M.Kes

2. Direktur Umum, SDM dan Pendidikan ..... dr. Obrin Parulian, M.Kes

6. Koordinator PIU ..... Kemaludin, SKM, MPH

7. Sekretaris PIU ..... Widiatmono Wibowo, SE

3. Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN .....

Dewi Anggraini, SE, MM

4. PPK Konstruksi .....

Rumi Saryati, S.Kep, Ners

5. PPK Non Konstruksi .....

Christiana Sri Andayani, S.Kep, MPH

8. Pokja Euqipment PIU .....

Djumijati, S.Kep, Ners

9. Sekretariat PIU .....

Arinindya Birul Nugraheni, SE